

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (pasal 1 butir 14 UU No. 5 Tahun 1990). Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mempunyai peranan yang penting dalam sejarah konservasi di Indonesia. Ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1980. Dengan luas 22.851,03 hektar, kawasan Taman Nasional ini ditutupi oleh hutan hujan tropis pegunungan, berjarak ±100 km atau sekitar 3 jam dari Jakarta.

TNGGP merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang dideklarasikan oleh Pemerintah Indonesia tahun 1980. Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango ditetapkan oleh UNESCO sebagai Cagar Biosfir pada tahun 1977, dan sebagai *Sister Park* dengan Taman Negara di Malaysia pada tahun 1995. Rekreasi dan pendakian merupakan aktivitas yang paling populer dilakukan pengunjung di TNGGP. TNGGP juga melayani program seperti rekreasi dengan pemanduan, pendakian oleh grup dengan pemanduan, pendidikan konservasi dan lingkungan untuk anak sekolah, kelompok pecinta alam, masyarakat umum, dan *camping*.

Kawasan hutan terluas yang tersisa di Pulau Jawa dapat ditemukan di dua Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kedua Taman Nasional ini merupakan habitat alami dari beberapa spesies yang terancam punah. Kawasan ini juga merupakan daerah tangkapan air bagi 20 juta penduduk yang tinggal di kota-kota sekelilingnya, termasuk Kota Jakarta, Ibukota Republik Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa nilai sumber air yang dimanfaatkan nilainya sebesar Rp.10 Milyar per tahunnya.

Mengingat pentingnya keberadaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, maka pada tahun 2003, Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 174/Kpts-II/2003 yang menetapkan perluasan kawasan Taman Nasional dari 15,196 hektar menjadi 22 851.030 Ha hektar. Lebih lanjut, Departemen Kehutanan juga telah memperluas Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang memungkinkan pengembangan koridor di antara kedua Taman Nasional ini.

Areal perluasan Taman Nasional sebelumnya merupakan kawasan hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani dan sebagian besar merupakan lahan yang telah terdegradasi. Di beberapa bagian areal perluasan dimaksud, terjadi perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk kegiatan pertanian. Pada umumnya areal yang dirambah tersebut berada di lereng gunung, dengan kelerengan lebih dari 30 derajat dan sangat rawan terjadinya longsor dan erosi. Vegetasi yang terdapat pada areal perluasan tersebut biasanya terdiri dari semak belukar dan rumput-rumputan yang kemudian seringkali dibuka oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian jangka pendek. Kemudian pada tahun 2003 pihak Taman Nasional mulai melakukan penyuluhan akan kawasan konservasi dan melarang pemanfaatan hutan secara berlebihan.

Penduduk Kampung Sarongge yang merupakan petani penggarap hutan yang berjumlah 155 orang harus pindah dan beralih dari hutan produksi ke pertanian ladang. Para petani yang sudah lama memanfaatkan hutan perhutani tidak terima akan peraturan tersebut, mereka beranggapan bahwa hutan adalah milik bersama bukan milik per-orangan maupun milik negara. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memberikan kompensasi berupa bibit tanaman organik dan hewan ternak berupa kelinci dan domba untuk di manfaatkan oleh petani sebagai pengganti hutan produksi sehingga petani tidak lagi memasuki kawasan hutan konservasi. Dari hal inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Petani Penggarap Setelah Perluasan Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat permasalahan yang perlu dianalisis yaitu:

1. Bagaimana keadaan hutan di TNGGP di Kampung Sarongge Desa Ciputri Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ?
2. Bagaimana kesejahteraan petani penggarap hutan di TNGGP di Kampung Sarongge, Desa Ciputri, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat?
3. Bagaimana Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Petani Penggarap Setelah Perluasan Kawasan TNGGP Di Kampung Sarongge Desa Ciputri Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada “Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Petani Penggarap Setelah Perluasan Kawasan TNGGP Di Kampung Sarongge Desa Ciputri Kabupaten Cianjur, Jawa Barat”.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan berbagai uraian yang telah disampaikan maka terkait dengan penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti “Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Petani Penggarap Setelah Perluasan Kawasan TNGGP Di Kampung Sarongge Desa Ciputri Kabupaten Cianjur, Jawa Barat”

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Mendapatkan data mengenai Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Petani Setelah Perluasan Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Di Kampung Sarongge Desa Ciputri Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

2. Bagi penulis sebagai penambah pengetahuan penelitian sosial tentang kehidupan petani di Kampung Sarongge Desa Ciputri Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.